

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 –**

2020

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Rizky Nur Alfian
Nomor Mahasiswa : 18313193
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di
Provinsi Banten pada Tahun 2016 – 2020

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Rizky Nur Alfian
Nomor Mahasiswa : 18313193
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2022

Penulis



Rizky Nur Alfian

PENGESAHAN

Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di
Provinsi Banten Tahun 2016 – 2020

Nama : Rizky Nur Alfian
Nomor Mahasiswa : 18313193
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 Januari 2022
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

NIP: 933130103

الجامعة الإسلامية
الابستد الاندو

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat ridho dan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan yang penulis harapkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, motivasi, dan dorongan dari banyak pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta bapak Abdul Fatah dan ibu Sulasih yang selalu mendoakan serta memberikan semangat, motivasi, dan dukungan. Terimakasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, sehingga anaknya bisa sampai di titik seperti sekarang. Semoga dengan hal ini dapat mengawali langkah untuk membuat bapak dan ibu bahagia hingga seterusnya.
2. Kedua adik penulis. Fiko dan Faqih yang selalu memberikan kepercayaan penuh dan menjadi penghibur ketika penulis mengalami kesulitan saat menyelesaikan skripsi.
3. Kakak tercinta Mas Nanang, Mas Sidik, dan Mas Fatur yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan saran untuk panduan dalam menyelesaikan studi.
4. Sobat Pejuang, yaitu Fila, Anis, Faqih, Ghufron, Indra, Isan, Arul, Meita, Nidhom, Puput, Rahmat, dan Tata yang telah membantu dan berjuang bersama sejak awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Palem Waregu, yaitu Alman, Bayu, Dimas, Fakri, Jamdani, dan Ragil yang selalu menemani dalam keseharian penulis, terkadang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Dahlia Masfila yang selalu memberikan motivasi, semangat, bantuan dan dukungan agar tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing, yang telah membantu dengan tekun dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga besar Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2016 – 2020”**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, motivasi, dan dorongan dari banyak pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

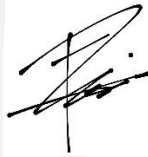
1. Allah SWT atas ridho dan rahmat-Nya penelitian ini dapat selesai dengan lancar, baik, dan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA Ketua Prodi Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dengan tekun dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Rekan satu bimbingan yaitu Faqih, Indra, Kumala, Meita, Ghufroon, Feren, Ubudiyah, Naura, Reka, Nabilah, Eka, dan Dyah atas kerja sama tim dan dukungannya satu sama lain.
8. Keluarga Ilmu Ekonomi 2018
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dukungan dalam proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan

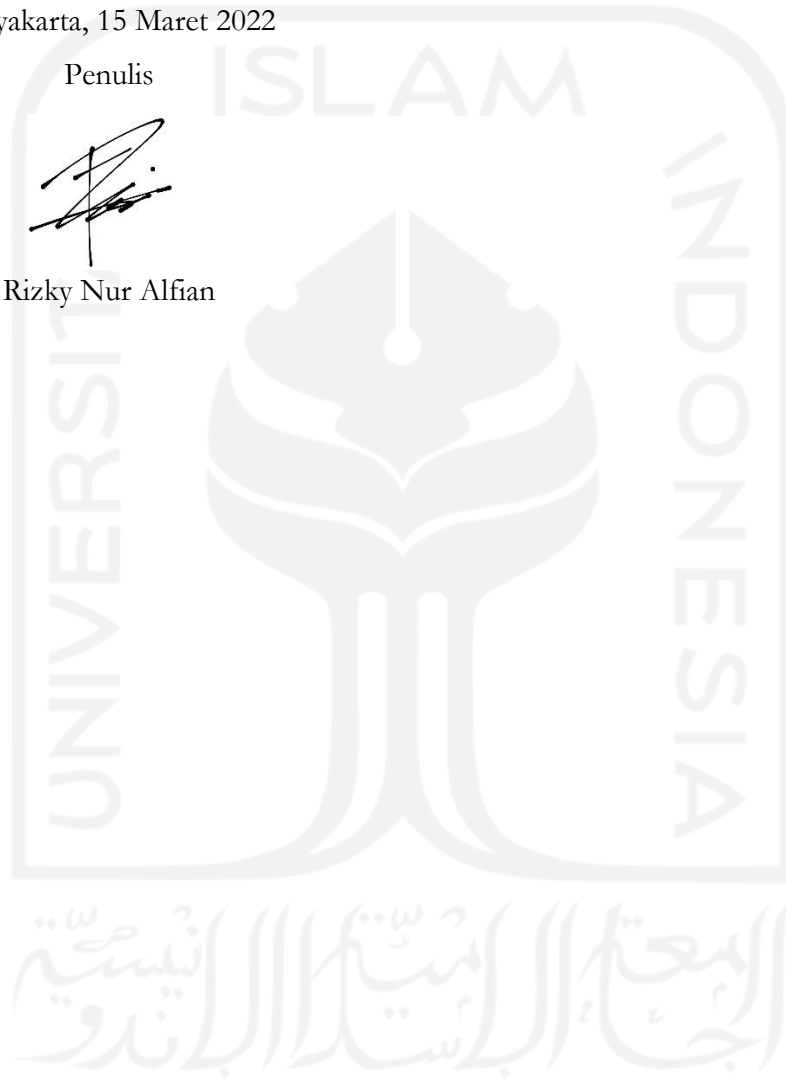
informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Diharapkan dengan skripsi ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi yang memerlukannya.

Yogyakarta, 15 Maret 2022

Penulis



Rizky Nur Alfian



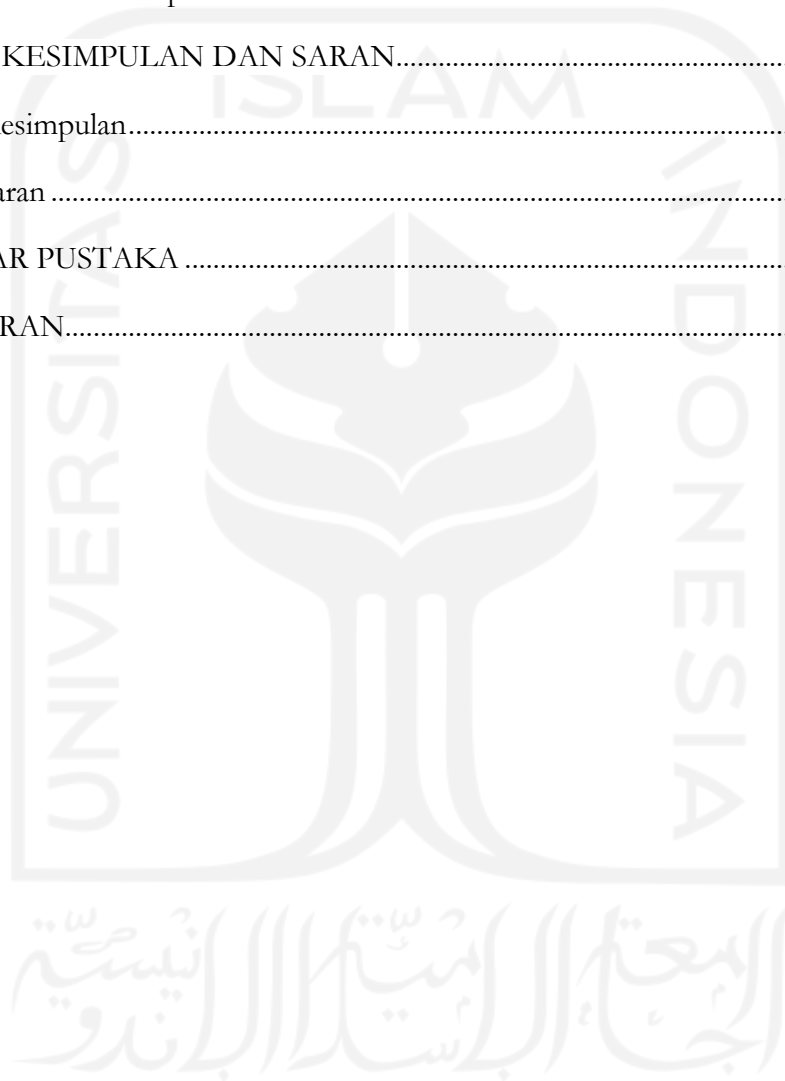
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	9
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah.....	10
2.2.3 Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi	12
2.2.4 Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan.....	13
2.2.5 Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial	14

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14
2.3 Hubungan Antara Variabel	15
2.3.1 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	15
2.3.2 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	16
2.3.3 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	17
2.3.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	17
2.4 Kerangka Pemikiran	18
2.5 Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis dan Sumber Pengumpulan Data	20
3.2 Definisi Operasional Variabel	20
3.2.1 Variabel Dependen	20
3.2.2 Variabel Independen	21
3.2.2.1 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi	21
3.2.2.2 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan	21
3.2.2.3 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial	21
3.2.2.4 Variabel Produk Domestik Regional Bruto	21
3.3 Metode Analisis	22
3.4 Pemilihan Model Estimasi	23
3.4.1 Common Effect Model	23
3.4.2 Fixed Effect Model	23
3.4.3 Random Effect Model	23

3.5 Pemilihan Model Terbaik	24
3.5.1 Uji Chow.....	24
3.5.2 Uji Hausman	24
3.6 Uji Statistik.....	24
3.6.1 Koefisien Determinasi (R-Squared).....	24
3.6.2 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	25
3.6.3 Uji t-statistik	25
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Deskripsi Data Penelitian	26
4.2 Estimasi Regresi Data Panel	29
4.2.1 Model Common Effect	29
4.2.2 Model Fixed Effect	30
4.2.3 Model Random Effect.....	31
4.3 Pemilihan Model.....	32
4.3.1 Uji Chow.....	32
4.3.2 Uji Lagrange Multiplier.....	33
4.3.3 Uji Hausman	34
4.4. Evaluasi Hasil.....	35
4.4.1 Keباikan Garis Regresi (R ²)	35
4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	35
4.4.3 Uji Signifikansi (Uji t).....	35
4.5 Analisis Hasil.....	36
4.5.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)	36
4.5.2 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)	36

4.5.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)	37
4.5.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X4) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)	37
4.6 Analisis Intersep.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2020.....	2
Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia.....	10
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	27
Tabel 4.2 Hasil Regresi Model <i>Common Effect</i>	29
Tabel 4.3 Hasil Regresi Model <i>Fixed Effect</i>	30
Tabel 4.4 Hasil Regresi Model <i>Random Effect</i>	31
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Chow</i>	32
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	33
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	34
Tabel 4.8 Analisis Intersep.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 18



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Variabel Dependen dan Independent	44
Lampiran B Model <i>Common Effect</i>	45
Lampiran C Model <i>Fixed Effect</i>	46
Lampiran D Model <i>Random Effect</i>	47
Lampiran E Uji <i>Chow</i>	48
Lampiran F Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	49
Lampiran G Uji <i>Hausman</i>	50



HALAMAN ABSTRAK

Pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan ekonomi di setiap kabupaten/kota. Salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi adalah dengan cara melihat keberhasilan suatu negara meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu keberhasilan peningkatan pembangunan ekonomi adalah melalui IPM. IPM dapat tergambarkan melalui aspek ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan aspek sosial yaitu kesehatan dan perlindungan sosial. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut dapat tersalurkan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang dikategorikan berdasarkan fungsi antara lain ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui badan pusat statistik dan direktorat jendral perimbangan kementerian keuangan Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian mengatakan bahwa pengeluaran fungsi ekonomi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap IPM.

Kata Kunci: Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah aspek penting dalam kehidupan bernegara. Pada negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu peran pemerintah menjadi penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Salah satu faktor dalam menggambarkan pembangunan ekonomi di suatu negara adalah dengan cara melihat keberhasilan kabupaten/kota meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan manusia di suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu faktor yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Meskipun IPM tidak dapat mengukur semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan manusia secara keseluruhan, namun melalui tiga faktor utama yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan IPM dipercaya dapat mengukur pembangunan manusia di suatu wilayah. (Arfiyansyah,, 2018)

United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan konsep alat ukur untuk menghitung kesuksesan pembangunan manusia yang dikenal dengan istilah *Human Development Index* (HDI) / Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah dapat tergambarkan melalui tiga elemen dasar yaitu: kesehatan diukur dengan angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan diukur dengan angka kemampuan baca/melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, kemudian standar hidup layak diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat (Mulia & Saputra, 2020).

Peran pemerintah daerah menjadi faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Melalui berbagai kebijakan yang ada, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah yang dapat diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur melalui

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya, mengenai pembahasan soal peningkatan pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah melalui APBD diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan pengeluaran pemerintah secara tepat sesuai dengan fungsinya.

Kategori pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja pemerintah terbagi menjadi sembilan fungsi jenis belanja, yaitu: Belanja Pelayanan Umum, Belanja Ketertiban dan Ketentraman, Belanja Ekonomi, Belanja Lingkungan Hidup, Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum, Belanja Kesehatan, Belanja Pariwisata dan Budaya, Belanja Pendidikan, Belanja Perlindungan Sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 33 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Dari beberapa fungsi tersebut terdapat tiga kategori yang akan diteliti lebih lanjut untuk melihat pengaruhnya terhadap IPM, yaitu: Belanja Pemerintah Ekonomi, Belanja Pemerintah, Kesehatan, dan Belanja Pemerintah Perlindungan Sosial.

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia didominasi oleh pulau Jawa hal ini disebabkan oleh aktivitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia berpusat di pulau Jawa karena jumlah tenaga kerja yang besar menjadi faktor pendukung peningkatan Indeks Pembangunan di Indonesia di pulau Jawa. Provinsi yang berada di pulau Jawa sebagian besar sudah masuk dalam kategori sedang-tinggi karena memiliki nilai 60 – 80 berstatus sedang, dan 70 – 80 berstatus tinggi. Data IPM per provinsi di pulau Jawa ditampilkan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2020

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
DKI JAKARTA	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77
DI YOGYAKARTA	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97
BANTEN	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45
JAWA BARAT	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09
JAWA TENGAH	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87
JAWA TIMUR	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71

TABEL 1.1 SUMBER: BPS

Berdasarkan tabel 1.1 IPM di setiap provinsi di pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Khususnya provinsi Banten yang berada paling dekat dengan pusat ekonomi Indonesia yaitu ibu kota DKI Jakarta, provinsi Banten juga sering dikenal sebagai “Provinsi Penyangga Ibu Kota” karena banyak tenaga kerja yang memiliki tempat tinggal di provinsi Banten namun bekerja di provinsi DKI Jakarta karena untuk biaya hidup yang lebih murah. Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Banten berada di peringkat ketiga dari enam provinsi yang ada di pulau Jawa hal ini dikarenakan Banten berada di wilayah yang strategis karena dekat dengan DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan. Provinsi Banten memiliki posisi yang strategis dari segi jalur perdagangan yang menghubungkan pulau Jawa dengan Sumatera.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh sebab itu penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2016 – 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020?

5. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
3. Untuk mengetahui hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
4. Untuk mengetahui hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
5. Untuk mengetahui hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis: Penelitian ini digunakan penulis sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Pemerintah: Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk proses pembangunan yang berkaitan dengan Indeks pembangunan Manusia.
3. Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pada bidang ekonomi terutama mengenai indeks pembangunan manusia di provinsi Banten serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini membahas kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu dengan tema yang saling terkait, kemudian landasan teori membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan untuk menulis penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis sumber data, definisi operasional variabel, serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Regresi Data Panel.

BAB V : Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran

yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Banten.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang terkait untuk menjadi dasar dalam menyusun penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Arfiyansyah (2018) meneliti dengan judul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah daerah tingkat provinsi yang dianalisis melalui belanja fungsi ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di lima belas provinsi di Indonesia berdasarkan kelas IPM tinggi maupun rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah melalui belanja fungsi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, alokasi pengeluaran pemerintah melalui belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Palayukan (2019) meneliti dengan judul Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah daerah tingkat provinsi yang dianalisis melalui belanja fungsi perlindungan sosial dan kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah melalui belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hayati (2018) meneliti dengan judul Faktor-faktor Mempengaruhi IPM di Kota Banjarmasin. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah daerah tingkat provinsi yang dianalisis melalui belanja fungsi perlindungan

sosial dan kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah melalui belanja fungsi perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, alokasi pengeluaran pemerintah melalui belanja fungsi kesehatan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Rakhmadhani (2018) meneliti dengan judul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesenjangan Antar Daerah dan Pembiayaan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Sapaat (2020) meneliti dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019). Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis apakah Produk Domestik Regional Bruto PDRB berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Data Panel. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu perbedaannya terletak pada lokasi, tahun, serta variabel-variabel independennya. Pada penelitian ini, menggunakan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selain itu, variabel independen yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan,

Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial, dan PDRB. Diharapkan dengan pilihan variabel independent tersebut dapat menjelaskan adanya pengaruh dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 1990 United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan konsep pembangunan manusia dengan paradigma yang memperhitungkan dimensi sosial sebagai tambahan atas paradigma ekonomi yang sebelumnya menjadi acuan mengenai pembangunan manusia. (UNDP, 1990) pada laporan "*Global Human Development Report*" yang membahas mengenai pembangunan manusia juga dapat dilihat melalui taraf hidup, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki setiap individu. Konsep ini merupakan perkembangan dari konsep sebelumnya yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat, kebutuhan dasar, dan pengembangan sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indikator yang dapat menjadi standar dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju tidak dapat diukur hanya berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDB) saja, namun memperhatikan faktor lain yakni aspek pendidikan dan kesehatan. Sudut pandang terhadap pembangunan mengalami perubahan secara terus-menerus, saat ini kriteria pembangunan di suatu wilayah menjadikan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada sumber daya manusia merupakan hal penting sementara faktor produksi lain seperti modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor pendukung. Pada dasarnya, manusia adalah yang dapat mengolah sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi seperti pengumpulan modal, dan melaksanakan pembangunan nasional.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator dalam menghitung pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia berperan penting guna mengukur keberhasilan atas upaya pembangunan manusia dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia merupakan data penting karena selain tolak

ukur atas efektifitas kebijakan pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi salah satu faktor penentu besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dialokasikan oleh pemerintah (BPS, 2015)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan standar kualitas hidup. Sebagai alat ukur kualitas pembangunan manusia, IPM memperhitungkan berdasarkan tiga pendekatan dimensi dasar. Dimensi tersebut yaitu kesehatan, standar hidup layak, dan pengetahuan. Pada dimensi kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup sejak lahir. Selanjutnya, pada dimensi standar hidup layak diukur melalui kemampuan daya beli, dimana kemampuan daya beli masyarakat membeli barang pokok digambarkan melalui pendekatan pengeluaran per kapita. Kemudian, pada dimensi pengetahuan diukur melalui gabungan antara indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

(BPS, 2022) mengkategorikan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah dengan membagi kategori menjadi empat kelompok. Hal ini bertujuan untuk mengorganisir wilayah dengan kelompok yang sama sesuai dengan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Berikut ini adalah kategori keberhasilan pembangunan manusia ditampilkan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

No	Skor Indeks Pembangunan Manusia	Keterangan
1	0,0 – 50	Rendah
2	50 – 80	Sedang
3	80 – 90	Tinggi
4	90 – 100	Sangat Tinggi

TABEL 2.1 SUMBER: UNDP

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pemenuhan pelayanan publik yang berdasarkan kebijakan pemerintah dalam kegiatan meningkatkan pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Daerah (APBD). Pelayanan Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yaitu bagi setiap warga negara berhak atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan public (Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Kategori Belanja Pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan fungsi yakni Belanja Pelayanan Umum, Belanja Ketertiban dan Ketentraman, Belanja Ekonomi, Belanja Lingkungan Hidup, Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum, Belanja Kesehatan, Belanja Pariwisata dan Budaya, Belanja Pendidikan, Belanja Perlindungan Sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 33 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Mangkoesebroto (2016) memberikan penjelasan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menjadi cerminan kebijakan pemerintah di suatu wilayah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut dibiayai melalui anggaran pemerintah yang kemudian dikeluarkan melalui pengeluaran pemerintah.

a. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menegaskan bahwa kegiatan pemerintah seiring waktu akan meningkat juga didukung oleh pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi. Menurut Wagner semakin meningkatnya pendapatan masyarakat maka pengeluaran pemerintah akan terus meningkat seiring waktu. Karena pemerintah harus mengatur kestabilan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, hukum, budaya, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah disebabkan oleh meningkatnya fungsi kesejahteraan, fungsi perbankan, fungsi pembangunan, dan fungsi pertahanan. Hukum Wagner juga populer dengan *The Law of Expanding Statue Expenditure*. Hukum ini didasarkan pada studi pengamatan empiris di negara maju (Idris, 2016)

b. Teori Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave berpendapat bahwa ada hubungan antara pembangunan dengan pengeluaran pemerintah, hal ini didasarkan dengan menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi yang dibagi menjadi tiga tahap yakni: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi menurut Rostow dan Musgrave jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini pemerintah harus melakukan investasi agar dapat menunjang sarana dan prasarana seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah memiliki fungsi untuk mendorong pertumbuhan agar semakin meningkat. Pada tahap ini investasi pemerintah berkembang dengan investasi swasta yang juga semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahap lanjutan menurut Rostow dan Musgrave berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah beralih fungsi dari penyedia sarana prasarana kegiatan ekonomi menjadi pengeluaran untuk layanan masyarakat seperti program hari tua, program pendidikan, program kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori Rostow dan Musgrave muncul berdasarkan pengamatan atas pengalaman pembangunan yang sudah dialami oleh banyak negara namun tidak didasari oleh teori tertentu.

2.2.3 Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi

Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki perangkat dalam meningkatkan pembangunan manusia yaitu kebijakan fiskal. Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah pengalokasian dana anggaran berdasarkan fungsi. Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi adalah salah satu fungsi belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan dari Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi yang berkaitan dengan fasilitas publik yaitu: pengembangan usaha koperasi dan UMKM, transportasi, pertanian, irigasi, dan sebagainya.

Peranan penting pengeluaran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik seperti barang dan jasa akan menentukan jumlah akumulasi modal dan investasi masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terjadinya akumulasi modal dan investasi menyebabkan peningkatan pada sektor produksi yang menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Salah satu indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memperhitungkan kontribusi unit usaha. Apabila suatu unit usaha memiliki kontribusi besar namun pertumbuhannya lambat maka hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Sebaliknya, apabila suatu unit usaha memiliki kontribusi besar dan pertumbuhannya tinggi maka akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Upaya pemerintah dalam bidang ekonomi adalah dengan melakukan investasi berupa alokasi anggaran untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik baik fisiki dan nonfisik di bidang ekonomi. Investasi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor ekonomi. Dengan kemudahan akses tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan tersedianya pelayanan public yang terkait dengan administrasi di bidang ekonomi dapat dipenuhi sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Efektifitas alokasi anggaran dalam hal ini belanja pemerintah bidang ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena produktivitas yang tinggi di suatu wilayah maka keperluan untuk pelayanan ekonomi semakin dibutuhkan.

2.2.4 Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan

Peranan penting pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu hidup sehat. Tujuan utama kesehatan harus dianggap sebagai kebutuhan yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah.

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan adalah dengan melakukan investasi berupa alokasi anggaran untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik baik fisiki dan nonfisik di bidang kesehatan. Investasi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan. Dengan kemudahan akses tersebut diharapkan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan

dapat dipenuhi sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Efektifitas alokasi anggaran dalam hal ini belanja pemerintah bidang kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena produktivitas yang tinggi di suatu wilayah maka keperluan untuk pelayanan kesehatan semakin dibutuhkan.

2.2.5 Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

Belanja pemerintah bidang perlindungan sosial adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam proses pembangunan manusia dengan cara mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di suatu wilayah. Pembukaan UUD 1945 memberikan pesan mengenai pemerintah harus melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

UUD Pasal 34, 1945 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan mewajibkan pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang bersifat menyeluruh.

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan adalah dengan melakukan investasi berupa alokasi anggaran untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik baik fisik dan nonfisik di bidang perlindungan sosial. Investasi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor perlindungan sosial. Dengan kemudahan akses tersebut diharapkan masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial dapat dikurangi sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Efektifitas alokasi anggaran dalam hal ini belanja pemerintah bidang perlindungan sosial harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena apabila angka kemiskinan tinggi di suatu wilayah maka keperluan untuk pelayanan perlindungan sosial semakin dibutuhkan.

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

(BPS, 2016) memberikan penjelasan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Perhitungan PDRB didasarkan pada jumlah pertambahan nilai yang dihasilkan oleh unit usaha di suatu daerah atau penjumlahan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit usaha dalam perekonomian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi atas dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah perhitungan pertambahan nilai suatu barang dan jasa berdasarkan harga yang berjalan setiap tahunnya. Selain itu, PDRB atas dasar harga berlaku memiliki fungsi untuk mengetahui kondisi ekonomi dan perubahan perekonomian di suatu kabupaten/kota. Kemudian, PDRB atas dasar harga konstan memiliki fungsi untuk menghitung nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu ditetapkan sebagai tahun dasar. Selain itu PDRB atas dasar harga konstan memiliki fungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil setiap tahunnya di suatu daerah.

2.3 Hubungan Antara Variabel

2.3.1 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia

Kahang (2016) menjelaskan bahwa alokasi belanja daerah fungsi ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa belanja daerah fungsi ekonomi berkontribusi dalam pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kesejahteraan semakin meningkat sehingga dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam bidang ekonomi adalah dengan melakukan investasi berupa alokasi anggaran untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik baik fisik dan nonfisik di bidang ekonomi. Investasi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor ekonomi. Dengan kemudahan akses tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan tersedianya pelayanan public yang terkait dengan administrasi di bidang ekonomi dapat dipenuhi sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Efektifitas alokasi anggaran dalam hal ini belanja pemerintah bidang ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena produktivitas yang tinggi di suatu wilayah maka keperluan untuk pelayanan ekonomi semakin dibutuhkan.

Salah satu indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memperhitungkan kontribusi unit usaha. Apabila suatu unit usaha memiliki kontribusi besar namun pertumbuhannya lambat maka hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Sebaliknya, apabila suatu unit usaha memiliki kontribusi besar dan pertumbuhannya tinggi maka akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

2.3.2 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia

Todaro & Smith (2011), menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan menjadi faktor penting dalam produktivitas manusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun, memelihara, dan meningkatkan fasilitas kesehatan guna meningkatkan pembangunan manusia. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat tergambar melalui meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya nilai angka kematian bayi, dan menurunnya angka kematian ibu melahirkan. Peningkatan kualitas kesehatan ini pada akhirnya akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan adalah dengan melakukan investasi berupa alokasi anggaran untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik baik fisik dan nonfisik di bidang kesehatan. Investasi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan. Dengan kemudahan akses tersebut diharapkan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan dapat dipenuhi sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Efektifitas alokasi anggaran dalam hal ini belanja pemerintah bidang kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena produktivitas yang tinggi di suatu wilayah maka keperluan untuk pelayanan kesehatan semakin dibutuhkan.

Kesehatan adalah syarat penting dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, dalam pembangunan manusia kesehatan juga termasuk dalam komponen yang penting sebagai input produksi secara menyeluruh, peran kesehatan memiliki fungsi aktif baik

sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan menjadi penting dalam pembangunan manusia.

2.3.3 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut negara memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan spesifik. Mengenai jaminan kesejahteraan masyarakat terhadap resiko sosial, pemerintah memiliki kebijakan berupa bantuan sosial yang diharapkan dapat menaikan taraf hidup masyarakat miskin yang kemudian mempengaruhi standar hidup layak masyarakat dan pada akhirnya akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan adalah dengan melakukan investasi berupa alokasi anggaran untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik baik fisiki dan nonfisik di bidang perlindungan sosial. Investasi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor perlindungan sosial. Dengan kemudahan akses tersebut diharapkan masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial dapat dikurangi sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Efektifitas alokasi anggaran dalam hal ini belanja pemerintah bidang perlindungan sosial harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena apabila angka kemiskinan tinggi di suatu wilayah maka keperluan untuk pelayanan perlindungan sosial semakin dibutuhkan.

2.3.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

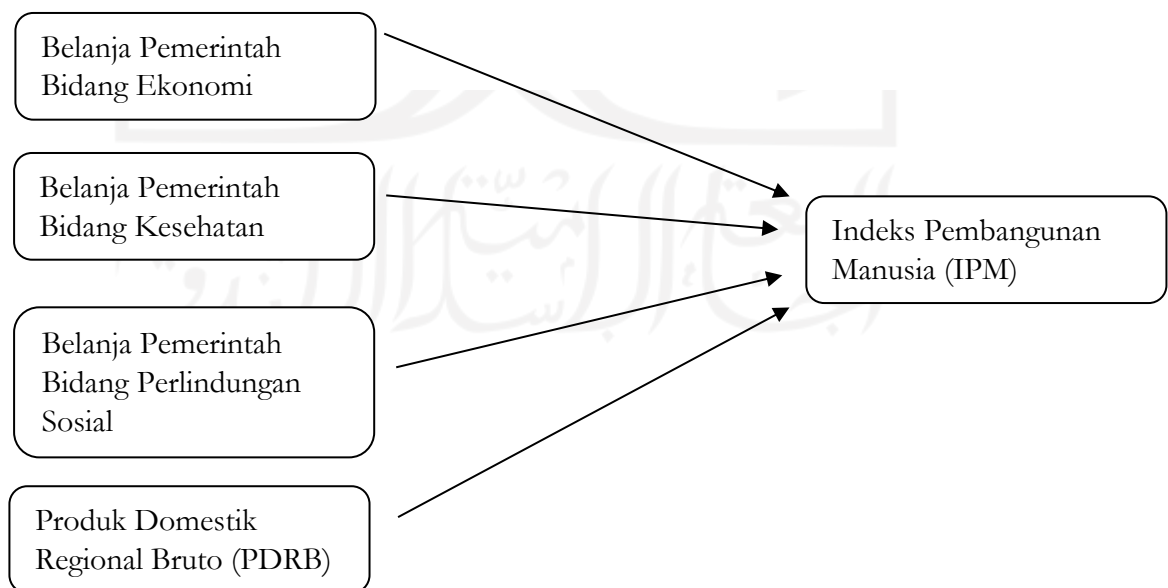
Wijiani (2018) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) apabila pendapatan masyarakat meningkat maka akan PDRB juga akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan pengeluaran masyarakat meningkat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi atas dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah perhitungan pertambahan nilai suatu barang dan jasa berdasarkan harga yang berjalan setiap tahunnya. Selain itu, PDRB atas dasar harga berlaku memiliki fungsi untuk mengetahui kondisi ekonomi dan perubahan perekonomian di suatu kabupaten/kota. Kemudian, PDRB atas dasar harga konstan memiliki fungsi untuk menghitung nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu ditetapkan sebagai tahun dasar. Selain itu PDRB atas dasar harga konstan memiliki fungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil setiap tahunnya di suatu daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen dan menggunakan empat variabel independent yaitu Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto. Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran ditampilkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan awal yang sifatnya belum teruji oleh sebab itu diperlukan pembuktian kebenarannya melalui analisis data (empiris). Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi diduga memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Banten.
2. Variabel Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan diduga memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Banten.
3. Variabel Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial diduga memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Banten.
4. Variabel Produk Domestik Regional Bruto diduga memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Banten.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data pada penelitian ini berupa data panel, yaitu gabungan antara data *time series* dari tahun 2016 – 2020 dan data *cross section* dari 8 kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten. Data dari penelitian ini diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independent terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen di provinsi Banten.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam melakukan penelitian ini memerlukan alat pengujian agar data yang diperoleh dapat diolah menggunakan uji data sekunder yang bersumber dari laporan badan pusat statistik (BPS Banten) pada tahun 2016 – 2020 Dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Definisi variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indikator yang dapat menjadi standar dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju tidak dapat diukur hanya berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saja, namun memperhatikan faktor lain yakni aspek pendidikan dan kesehatan. Data variabel IPM diambil dari Badan Pusat Statistik yang terdiri dari

delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2016 – 2020 menggunakan satuan persen (%).

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi

Variabel Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi adalah alokasi belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten untuk mendanai aspek ekonomi yang menggunakan satuan juta rupiah. Data Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi tahun 2016 – 2020 diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.2.2.2 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan

Variabel Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan adalah alokasi belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten guna mendanai aspek kesehatan yang menggunakan satuan juta rupiah. Data Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan tahun 2016 – 2020 diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.2.2.3 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

Variabel Belanja Pemerintah Bidang perlindungan sosial adalah alokasi belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten guna mendanai aspek perlindungan sosial yang menggunakan satuan juta rupiah. Data Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial tahun 2016 – 2020 diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.2.2.4 Variabel Produk Domestik Regional Bruto

Variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah melalui perhitungan kontribusi unit usaha dalam menciptakan output untuk mendapatkan pendapatan. Data Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan tahun 2016 – 2020 diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menggunakan satuan juta rupiah.

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Kemudian pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independent terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen di provinsi Banten.

Analisis data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data *time series* adalah data yang dihitung pada kurun waktu tertentu seperti harian, bulanan, kuartal, semester dan tahunan. Sedangkan data *cross section* adalah data yang dihitung pada waktu yang sama dari beberapa daerah. Pembentukan data panel dilakukan dengan menggabungkan data *time series* dalam kurun waktu tertentu dengan data *cross section* pada obyek tertentu dalam kurun waktu tertentu (Widarjono, 2018).

Terdapat keuntungan ketika menggunakan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*) (Widarjono, 2018).

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + eit$$

Keterangan:

IPM: Indeks Pembangunan Manusia (%)

β_0 : koefisien intersep

X1: Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (Rp)

X2: Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (Rp)

X3: Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (Rp)

X4: Produk Domestik Regional Bruto (Rp)

i: Provinsi Banten

t: kurun waktu dari tahun 2016 – 2020

e: variabel pengganggu (error term)

3.4 Pemilihan Model Estimasi

Pemilihan model pada regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Common Effect Model

Common Effect Model adalah model yang paling sederhana dimana model ini hanya menggabungkan data time series dan cross section tanpa memperhatikan dimensi waktu dan individu. Pada model ini diasumsikan koefisien intersep adalah sama di masing-masing slope baik itu slope data time series maupun cross section sehingga persamaan model Common Effect Model dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + eit$$

3.4.2 Fixed Effect Model

Fixed Effect Model adalah model pendekatan yang memperhatikan perbedaan intersep sedangkan slope antar unit nya tetap sama. Variabel dummy digunakan dalam model ini untuk mengetahui adanya perbedaan intersep antar variabel. persamaan model Fixed Effect Model dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{12} D_{12} + eit$$

3.4.3 Random Effect Model

Random Effect Model adalah model data panel dimana variabel gangguan digunakan dalam estimasi dan memungkinkan untuk saling berhubungan antar unit. Intersep dalam model ini diasumsikan $\alpha_1 = \alpha_i + \mu_i$ dimana μ_i merupakan error yang random. persamaan model Random Effect Model dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{12} D_{12} + \varepsilon_i + eit$$

3.5 Pemilihan Model Terbaik

3.5.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara Common Effect Model dengan Fixed Effect Model dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho: Model terbaik adalah Common Effect Model

Ha: Model terbaik adalah Fixed Effect Model

Keputusan pada uji ini dapat diambil jika $p.value < 10\%$ maka artinya menolak Ho dan model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Jika $p.value > 10\%$ maka artinya gagal menolak Ho dan model yang dipilih adalah Common Effect Model.

3.5.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara Fixed Effect Model dengan Random Effect Model dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho: Model terbaik adalah Random Effect Model

Ha: Model terbaik adalah Fixed Effect Model

Keputusan pada uji ini dapat diambil dengan syarat, jika $p.value < 10\%$ maka artinya menolak Ho dan model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Jika $p.value > 10\%$ maka artinya gagal menolak Ho dan model yang dipilih adalah Random Effect Model.

3.6 Uji Statistik

3.6.1 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Uji R-Squared dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varian variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-squared bisa diartikan semakin besar pula hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat.

3.6.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model atau uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam penelitian. Ada dua kemungkinan dalam pengambilan keputusan pada uji ini yaitu:

$F_{hitung} > F_{kritis}$: artinya H_0 ditolak Semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama

$F_{hitung} < F_{kritis}$: artinya H_0 gagal ditolak. Semua variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama

Selain itu, membandingkan nilai probabilitas F_{hitung} dan F_{tabel} dengan syarat, jika nilai probabilitas $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka menolak H_0 artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila probabilitas $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka gagal menolak H_0 artinya variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

3.6.3 Uji t-statistik

Uji t statistik dilakukan untuk mencari tahu pengaruh antar individual variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara probabilitas dengan alpha (α) yaitu:

- Jika nilai probabilitas $< \alpha$ maka, menolak H_0 . Artinya secara individual variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas $> \alpha$ maka, gagal menolak H_0 . Artinya secara individual variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari publikasi tahunan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *cross-section* dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan data *time series* selama periode 2016-2020. Jumlah data yang diolah dan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 data. Selanjutnya, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independent belanja pemerintah bidang ekonomi, kesehatan, perlindungan Sosial, dan Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia). Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan diolah menggunakan aplikasi E-views 9 menggunakan teknik analisis regresi data panel.

Statistik Deskriptif adalah analisis statistik yang memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang dijelaskan melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
Indkes Pembangunan Manusia (Y)	40	70,9925	5,975852	62,78	81,48
Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (X1)	40	166.334	100.763	70.620	640.542
Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2)	40	510.133	301.982	103.341	1.356.908
Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X3)	40	41.658	23.249	13.777	115.605
Produk Domestik Regional Bruto (X4)	40	53.606.661	31.284.274	16.855.619	111.000.000

TABEL 4. 1 SUMBER: HASIL OLAH DATA, 2021. (DATA Y, X1, X2, X3, X4)

Berdasarkan Tabel 4.2.1, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal yaitu:

a. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (Y) didapatkan nilai minimum sampel pada tahun 2016 – 2020 adalah 62,78 terdapat pada wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, artinya Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut tergolong rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fasilitas yang dapat mendukung kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut masih belum memadai. Hal ini dikarenakan di wilayah Kabupaten Lebak masih sedikit kegiatan industri yang mengakibatkan lemahnya laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sehingga pendanaan untuk investasi pembangunan manusia di wilayah tersebut lambat penambahannya.

Berdasarkan tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (Y) didapatkan nilai maksimum sampel pada tahun 2016 – 2020 adalah 81,48 terdapat pada wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, artinya Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut tergolong tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fasilitas yang dapat mendukung kenaikan Indeks Pembangunan

Manusia di daerah tersebut sudah memadai. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah Kota Tangerang Selatan mudah dijangkau.

Berdasarkan tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (Y) didapatkan nilai rata-rata sampel pada tahun 2016 – 2020 adalah 70,99 artinya secara menyeluruh pembangunan manusia di Provinsi Banten termasuk dalam pembangunan manusia menengah. Selanjutnya, nilai standar deviasi Indeks Pembangunan Manusia (Y) menunjukkan bahwa sampel selama tahun 2016-2020 memiliki nilai standar deviasi sebesar 5,97.

b. Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (X1)

Berdasarkan tabel 4.1 Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (X1) didapatkan nilai minimum sampel pada tahun 2016 – 2020 sebesar Rp70.620.000.000 terdapat pada wilayah Kota Serang Provinsi Banten. Jumlah nilai maksimum sebesar Rp640.542.000.000 terdapat pada wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jumlah nilai rata-rata di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebesar Rp166.334.000.000. Sedangkan, nilai standar deviasi sebesar Rp166.334.000.000.

c. Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2)

Berdasarkan tabel 4.1 Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) didapatkan nilai minimum sampel pada tahun 2016 – 2020 sebesar Rp103.341.000.000 terdapat pada wilayah Kota Serang Provinsi Banten. Jumlah nilai maksimum sebesar Rp1.356.908.000.000 terdapat pada wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jumlah nilai rata-rata di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebesar Rp510.133.000.000. Sedangkan, nilai standar deviasi sebesar Rp301.982.000.000.

d. Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X3)

Berdasarkan tabel 4.1 Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X3) didapatkan nilai minimum sampel pada tahun 2016 – 2020 sebesar Rp13.777.000.000 terdapat pada wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jumlah nilai maksimum sebesar Rp115.605.000.000 terdapat pada wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jumlah nilai rata-rata di Kabupaten/Kota

Provinsi Banten sebesar Rp41.658.000.000. Sedangkan, nilai standar deviasi sebesar Rp23.249.000.000.

e. Produk Domestik Regional Bruto (X4)

Berdasarkan tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto (X4) didapatkan nilai minimum sampel pada tahun 2016 – 2020 sebesar Rp16.855.619.000.000 terdapat pada wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jumlah nilai maksimum sebesar Rp111.000.000.000.000 terdapat pada wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jumlah nilai rata-rata di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebesar Rp53.606.661.000.000. Sedangkan, nilai standar deviasi sebesar Rp31.284.274.000.000.

4.2 Estimasi Regresi Data Panel

Pengolahan data menggunakan regresi data panel adapun beberapa metode estimasi model yang digunakan, yaitu model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Model tersebut akan dipilih model yang paling baik atau model yang paling tepat yang digunakan dalam menganalisis pengolahan data panel.

4.2.1 Model Common Effect

Model Common Effect adalah model yang paling sederhana dimana model ini hanya menggabungkan data time series dan cross section tanpa memperhatikan dimensi waktu dan individu. Pada model ini diasumsikan koefisien intersep adalah sama di masing-masing slope baik itu slope data time series maupun cross section (Widarjono, 2018). Hasil estimasi dari pengolahan data model *common effect* ditampilkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Regresi Model *Common Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/21/21 Time: 01:24
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-12.18935	19.25538	-0.633036	0.5308
LOG(X1)	-0.234959	2.027060	-0.115911	0.9084
LOG(X2)	-3.009177	1.436381	-2.094971	0.0435
LOG(X3)	5.326930	2.243529	2.374353	0.0232
LOG(X4)	3.925620	1.920395	2.044173	0.0485
R-squared	0.575637	Mean dependent var	70.99250	
Adjusted R-squared	0.527138	S.D. dependent var	5.975852	
S.E. of regression	4.109291	Akaike info criterion	5.780846	
Sum squared resid	591.0194	Schwarz criterion	5.991956	
Log likelihood	-110.6169	Hannan-Quinn criter.	5.857177	
F-statistic	11.86914	Durbin-Watson stat	0.215983	
Prob(F-statistic)	0.000003			

TABEL 4. 2 SUMBER: HASIL OLAH EIEWS9, 2021

4.2.2 Model Fixed Effect

Model Fixed Effect adalah model dengan pendekatan yang memperhatikan perbedaan intersep sedangkan slope antar unit nya tetap sama. Variabel dummy digunakan dalam model ini untuk mengetahui adanya perbedaan intersep antar variabel (Widarjono, 2018). Hasil estimasi dari pengolahan data model *fixed effect* ditampilkan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Regresi Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/21/21 Time: 01:24
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-76.22605	12.67054	-6.016005	0.0000
LOG(X1)	0.279335	0.157006	1.779136	0.0861
LOG(X2)	-0.101715	0.228225	-0.445677	0.6593
LOG(X3)	-0.092010	0.167785	-0.548380	0.5878
LOG(X4)	8.306643	0.793497	10.46840	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998928	Mean dependent var	70.99250
Adjusted R-squared	0.998507	S.D. dependent var	5.975852
S.E. of regression	0.230921	Akaike info criterion	0.149844
Sum squared resid	1.493088	Schwarz criterion	0.656508
Log likelihood	9.003119	Hannan-Quinn criter.	0.333038
F-statistic	2371.802	Durbin-Watson stat	1.198339
Prob(F-statistic)	0.000000		

TABEL 4. 3 SUMBER: HASIL OLAH EIEWS9, 2021

4.2.3 Model Random Effect

Model Random Effect Model adalah model data panel dimana variabel gangguan digunakan dalam estimasi dan memungkinkan untuk saling berhubungan antar unit. (Widarjono, 2018). Hasil estimasi dari pengolahan data model *random effect* ditampilkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Regresi Model *Random Effect*

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/21/21 Time: 01:30
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.86154	12.45371	-5.930886	0.0000
LOG(X1)	0.267160	0.156398	1.708205	0.0965
LOG(X2)	-0.088392	0.225999	-0.391116	0.6981
LOG(X3)	-0.084351	0.167717	-0.502937	0.6182
LOG(X4)	8.166126	0.770817	10.59412	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.513380	0.9982
Idiosyncratic random		0.230921	0.0018

Weighted Statistics			
R-squared	0.844912	Mean dependent var	1.329527

Adjusted R-squared	0.827188	S.D. dependent var	0.548737
S.E. of regression	0.228114	Sum squared resid	1.821259
F-statistic	47.66962	Durbin-Watson stat	0.962457
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.331089	Mean dependent var	70.99250
Sum squared resid	931.6073	Durbin-Watson stat	0.001882

TABEL 4. 4 SUMBER: HASIL OLAH EIEWS9, 2021

4.3 Pemilihan Model

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow adalah metode untuk menentukan model terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect dengan melihat nilai distribusi p-value. Di dalam metode ini apabila nilai probabilitas lebih tinggi dari alpha (10%) maka model terbaik adalah Common Effect. Sedangkan apabila nilai probabilitas kurang dari alpha (10%) maka model terbaik adalah Fixed Effect. Berikut adalah hipotesis uji chow:

H0: Model Common Effect yang terbaik

Ha: Model Fixed Effect yang terbaik

Hasil uji chow ditampilkan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: CHI
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1579.347886	(7,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	239.240098	7	0.0000

TABEL 4. 5 SUMBER: HASIL OLAH EIEWS9, 2021

Dari hasil pengujian diatas didapatkan nilai prob-section F sebesar $0.0000 < \alpha$ (10%) maka menolak H0 dan menerima Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah Fixed Effect.

4.3.2 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier adalah metode untuk menentukan model terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect dengan melihat nilai probabilitas Bruesch-Pagan. Di dalam metode ini apabila nilai probabilitas lebih tinggi dari alpha (10%) maka model terbaik adalah Common Effect. Sedangkan apabila nilai probabilitas kurang dari alpha (10%) maka model terbaik adalah Random Effect. Berikut adalah hipotesis Uji Lagrange Multiplier, sebagai berikut:

H0: Model Common Effect yang terbaik

Ha: Model Random Effect yang terbaik

Hasil Uji Lagrange Multiplier ditampilkan dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	57.39269 (0.0000)	2.117896 (0.1456)	59.51059 (0.0000)
Honda	7.575796 (0.0000)	-1.455299 --	4.327845 (0.0000)
King-Wu	7.575796 (0.0000)	-1.455299 --	3.407450 (0.0003)
Standardized Honda	10.65825 (0.0000)	-1.298555 --	2.782652 (0.0027)
Standardized King-Wu	10.65825 (0.0000)	-1.298555 --	1.626518 (0.0519)
Gourierioux, et al.*	--	--	57.39269 (< 0.01)

TABEL 4. 6 SUMBER: HASIL OLAH EIEWS9, 2021

Dari hasil pengujian diatas didapatkan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar $0.0000 < \alpha$ (10%) maka menolak H_0 dan menerima H_a . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah Random Effect.

4.3.3 Uji Hausman

Uji Hausman adalah metode untuk menentukan model terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect dengan melihat nilai probabilitas cross-section random. Di dalam metode ini apabila nilai probabilitas lebih tinggi dari alpha (10%) maka model terbaik adalah Random Effect. Sedangkan apabila nilai probabilitas kurang dari alpha (10%) maka model terbaik adalah Fixed Effect. Berikut adalah hipotesis Uji Hausman:

H_0 : Model Random Effect yang terbaik

H_a : Model Fixed Effect yang terbaik

Hasil Uji Hausman ditampilkan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: HAUSMAN
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.154210	4	0.5324

TABEL 4. 7 SUMBER: HASIL OLAH EIEWS9, 2021

Dari hasil pengujian diatas didapatkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar $0.5324 > \alpha$ (10%) maka gagal menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah Random Effect.

4.4. Evaluasi Hasil

4.4.1 Keباikan Garis Regresi (R²)

Berdasarkan hasil estimasi tabel Random Effect didapatkan nilai R-squared sebesar 0,844912 artinya 84.49% variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Banten dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (X1), Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2), Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X3), dan Produk Domestik Regional Bruto (X4). Sedangkan 15,51% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel diatas, menunjukkan bahwa F Hitung sebesar 47.66962 dengan probabilitas F sebesar 0.0000, dengan ketentuan $\alpha = 10\%$. Maka Uji F signifikan karena nilai Prob F sebesar $0.0000 < 10\%$. Hal ini berarti menjelaskan bahwa variabel independen yaitu Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (X1), Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2), Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X3), dan Produk Domestik Regional Bruto (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

4.4.3 Uji Signifikansi (Uji t)

4.4.3.1 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien 0.267160 dan nilai probabilitas pada variabel X1 adalah $0.0965 < 10\%$, maka menolak H₀ dan menerima H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.3.2 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien -0.088392 dan nilai probabilitas pada variabel X2 adalah $0.6981 > 10\%$, maka gagal menolak H₀ sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Belanja Pemerintah

Bidang Kesehatan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.3.3 Variabel Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien -0.084351 dan nilai probabilitas pada variabel X3 adalah $0.6182 > 10\%$, maka gagal menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.3.4 Variabel Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien 8.166126 dan nilai probabilitas pada variabel X4 adalah $0.0000 < 10\%$, maka menolak H_0 dan menerima H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

4.5 Analisis Hasil

4.5.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien 0.267160 dan nilai probabilitas pada variabel X1 adalah 0.0965, artinya apabila belanja ekonomi ditingkatkan sebesar 1 persen, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia di akan naik sebesar 0.267160 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia oleh Arfiyansyah (2018).

4.5.2 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien -0.088392 dan nilai probabilitas pada variabel X2 adalah 0.6981, artinya

belanja kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena kurangnya perhatian terhadap peningkatan alokasi belanja bidang Kesehatan sehingga tidak dapat mendorong peningkatan IPM oleh Arfiyansyah (2018).

4.5.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien -0.084351 dan nilai probabilitas pada variabel X3 adalah 0.6182, artinya belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena kurangnya perhatian terhadap penyediaan akses perlindungan sosial yang universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dan seharusnya anggaran dibidang kesehatan dan pendidikan tidak perlu dimasukkan lagi dalam anggaran perlindungan sosial karena anggaran kesehatan dan pendidikan sudah memiliki anggaran yang tersendiri yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau disebut kurang tepat sasaran. oleh Hayati (2018)

4.5.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X4) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan regresi t-statistik didapatkan nilai koefisien 8.166126 dan nilai probabilitas pada variabel X4 adalah 0.0000, artinya apabila produk domestik regional bruto meningkat sebesar 1 persen, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia di akan naik sebesar 8.166126 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia oleh Rakhmadhani (2018)

4.6 Analisis Intersep

Tabel 4.8 Analisis Intersep

Kabupaten/Kota	Efek	Koefisien Regresi	Daerah Konstanta
Kab. Lebak	-1.00613	-73.86154	-74.86767
Kab. Pandeglang	0.344448	-73.86154	-73.517092
Kab. Serang	-6.21442	-73.86154	-80.075962
Kab. Tangerang	-5.46079	-73.86154	-79.322333
Kota Cilegon	-2.127	-73.86154	-75.988544
Kota Tangerang	-0.40514	-73.86154	-74.26668
Kota Serang	6.696526	-73.86154	-67.165014
Kota Tangerang Selatan	8.172515	-73.86154	-65.689025

TABEL 4. 8 SUMBER: HASIL OLAH DATA, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa 3 daerah yang memiliki nilai cross section tertinggi yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar -65.689025, Kota Serang sebesar -67.165014, dan Kabupaten Pandeglang sebesar -73.517092. Sedangkan 3 daerah yang memiliki nilai cross section terendah yaitu Kabupaten Serang sebesar -80.075962, Kabupaten Tangerang sebesar -79.322333, dan Kota Cilegon sebesar -75.98854.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. Maka apabila Belanja Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi mengalami peningkatan akan meningkatkan IPM.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa variable Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. Berarti bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ditingkatkan maka akan mengurangi pembangunan manusia. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan belanja pemerintah bidang kesehatan. Alokasi pada fungsi kesehatan harus ditingkatkan karena pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa variable Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. Berarti bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial digunakan untuk memberikan pelayanan bantuan sosial ditingkatkan maka akan mengurangi pembangunan manusia. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan belanja pemerintah bidang perlindungan sosial. Alokasi pada fungsi perlindungan

sosial harus ditingkatkan karena pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa variable PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM, ketika PDRB meningkat maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diambil dari pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran, sebagai berikut:

1. Fungsi ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan IPM di Provinsi Banten dibutuhkan alokasi pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi
2. Fungsi kesehatan dan perlindungan sosial memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan belanja di kedua sektor tersebut. Alokasi pada fungsi kesehatan dan perlindungan sosial harus ditingkatkan karena pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi belanja fungsi kesehatan dapat berupa perbaikan gizi, jaminan kesehatan, dan membangun fasilitas penunjang kesehatan. Selanjutnya alokasi belanja fungsi perlindungan sosial dapat berupa peningkatan sektor bantuan sosial seperti Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kedua sektor tersebut agar dapat menunjang pembangunan manusia di Provinsi Banten.
3. Pemerintah provinsi Banten sebagai penentu kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan manusia diharapkan memperhatikan Belanja Fungsi Ekonomi, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Perlindungan

Sosial, dan PDRB dalam pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia walaupun Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di provinsi Banten.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Kurniawan, I., Murtala, M., & Juanda, R. (2021). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 15. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3858>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. In . (pp. 1–101).
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI*. 11, 67–83.
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74–91. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376>
- Peraturan Pemerintah RI. (2012). *PP Nomor 96 Tahun-2012 Pelayanan Publik* (pp. 1–44).
- Rakhmadhani, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesenjangan Antar Daerah Dan Pembiayaan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembanguna Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 312.
- Sapaat, T. M., Lopian, A. L. C. P., Tumangkeng, S. Y. L., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI*. 20(03), 45–56.
- Wijiani, T. R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indkes Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016*. 1–12.

- Hayati, N. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi IPM di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 187–193. <https://doi.org/10.20527/jiep.v1i1.1127>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Konsep Indeks Pembangunan Manusia*
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Metodologi Indeks Pembangunan Manusia*
- UNDP, (1990). Human Development 1990, New York: Oxford University Press
- Mangkoesoebroto, Guritno. (2016). *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manakemen Dan Akuntansi*, 18(2), 130–140. <https://doi.org/10.1007/BF03173680>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Konsep Produk Domestik Regional Bruto*
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi (Edisi Kesebelas ed.)*. Erlangga.

LAMPIRAN

Lampiran A Data Variabel Dependen dan Independent

Kabupaten/Kota	Tahun	Y IPM (%)	X1 BELANJA PEMERINTAH BIDANG EKONOMI (Juta Rupiah)	X2 BELANJA PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN (Juta Rupiah)	X3 BELANJA PEMERINTAH BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL (Juta Rupiah)	X4 PDRB (Juta Rupiah)
Kab. Lebak	2016	62.78	116495.30	333784.70	13777.13	17665397.46
Kab. Lebak	2017	62.95	113338.90	342391.10	14512.28	18683739.21
Kab. Lebak	2018	63.37	120584.16	374480.76	15773.75	19735870.92
Kab. Lebak	2019	63.88	113420.96	442604.18	14758.06	20830482.66
Kab. Lebak	2020	63.91	161549.60	535109.79	17714.82	20646560.58
Kab. Pandeglang	2016	63.40	213061.75	562756.13	51027.89	16855618.52
Kab. Pandeglang	2017	63.82	84465.82	311922.03	22042.48	17866428.41
Kab. Pandeglang	2018	64.34	132649.25	364421.40	20138.69	18812931.91
Kab. Pandeglang	2019	64.91	127565.87	410514.66	20170.56	19705734.19
Kab. Pandeglang	2020	65.00	119589.58	497239.64	18111.28	19600075.14
Kab. Serang	2016	65.12	193000.80	482875.55	27688.00	46715184.52
Kab. Serang	2017	65.60	173674.87	477625.26	28322.27	49154636.22
Kab. Serang	2018	65.93	154282.31	498092.19	55851.95	51754319.98
Kab. Serang	2019	66.38	93491.53	545850.79	30360.07	54349794.59
Kab. Serang	2020	66.70	77899.77	531588.55	44131.38	53286830.97
Kab. Tangerang	2016	70.44	155244.33	956765.37	41362.46	82183596.15
Kab. Tangerang	2017	70.97	182969.63	1010248.95	43773.27	86964026.88
Kab. Tangerang	2018	71.59	191510.47	1199933.99	59985.30	92011405.21
Kab. Tangerang	2019	71.93	226095.48	1212562.61	52148.40	97142198.47
Kab. Tangerang	2020	71.92	238685.86	1356907.59	60535.19	93544933.63
Kota Cilegon	2016	72.04	100314.67	242504.03	33410.38	62981047.41
Kota Cilegon	2017	72.29	170939.95	262949.66	45335.52	66444529.41
Kota Cilegon	2018	72.65	153606.69	237720.15	37324.70	70502082.41
Kota Cilegon	2019	73.01	131092.76	335242.44	41279.56	74249299.43
Kota Cilegon	2020	73.05	123347.86	328533.84	41291.83	73596660.22
Kota Tangerang	2016	76.81	244308.12	586311.04	57230.83	95654618.05
Kota Tangerang	2017	77.01	295616.62	562380.45	73311.99	101274679.40
Kota Tangerang	2018	77.92	262352.82	589985.46	108666.47	106283617.41
Kota Tangerang	2019	78.43	353180.70	644312.65	115605.30	110592776.31
Kota Tangerang	2020	78.25	640541.83	704015.99	75621.73	102942389.09
Kota Serang	2016	71.09	77459.28	103340.84	22063.06	18935486.29
Kota Serang	2017	71.31	82179.70	152641.14	25762.31	20153022.87
Kota Serang	2018	71.68	70619.82	137847.76	28336.89	21482093.45
Kota Serang	2019	72.10	80360.43	143003.23	35786.25	22813096.37
Kota Serang	2020	72.16	81373.87	144836.11	35541.13	22518203.96
Kota Tangerang Selatan	2016	80.11	199091.55	221293.73	65723.68	48552983.88
Kota Tangerang Selatan	2017	80.84	214885.88	494782.28	32229.85	52098555.90
Kota Tangerang Selatan	2018	81.17	164407.69	524741.27	42376.40	55999106.77
Kota Tangerang Selatan	2019	81.48	107558.67	777877.62	45141.53	60145115.32
Kota Tangerang Selatan	2020	81.36	110556.33	763340.59	52076.00	59537303.12

Lampiran B Model *Common Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/21/21 Time: 01:24
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.18935	19.25538	-0.633036	0.5308
LOG(X1)	-0.234959	2.027060	-0.115911	0.9084
LOG(X2)	-3.009177	1.436381	-2.094971	0.0435
LOG(X3)	5.326930	2.243529	2.374353	0.0232
LOG(X4)	3.925620	1.920395	2.044173	0.0485
R-squared	0.575637	Mean dependent var	70.99250	
Adjusted R-squared	0.527138	S.D. dependent var	5.975852	
S.E. of regression	4.109291	Akaike info criterion	5.780846	
Sum squared resid	591.0194	Schwarz criterion	5.991956	
Log likelihood	-110.6169	Hannan-Quinn criter.	5.857177	
F-statistic	11.86914	Durbin-Watson stat	0.215983	
Prob(F-statistic)	0.000003			

Lampiran C Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/21/21 Time: 01:24
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-76.22605	12.67054	-6.016005	0.0000
LOG(X1)	0.279335	0.157006	1.779136	0.0861
LOG(X2)	-0.101715	0.228225	-0.445677	0.6593
LOG(X3)	-0.092010	0.167785	-0.548380	0.5878
LOG(X4)	8.306643	0.793497	10.46840	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998928	Mean dependent var	70.99250
Adjusted R-squared	0.998507	S.D. dependent var	5.975852
S.E. of regression	0.230921	Akaike info criterion	0.149844
Sum squared resid	1.493088	Schwarz criterion	0.656508
Log likelihood	9.003119	Hannan-Quinn criter.	0.333038
F-statistic	2371.802	Durbin-Watson stat	1.198339
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D Model *Random Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/21/21 Time: 01:30
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.86154	12.45371	-5.930886	0.0000
LOG(X1)	0.267160	0.156398	1.708205	0.0965
LOG(X2)	-0.088392	0.225999	-0.391116	0.6981
LOG(X3)	-0.084351	0.167717	-0.502937	0.6182
LOG(X4)	8.166126	0.770817	10.59412	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			5.513380	0.9982
Idiosyncratic random			0.230921	0.0018
Weighted Statistics				
R-squared	0.844912	Mean dependent var	1.329527	
Adjusted R-squared	0.827188	S.D. dependent var	0.548737	
S.E. of regression	0.228114	Sum squared resid	1.821259	
F-statistic	47.66962	Durbin-Watson stat	0.962457	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.331089	Mean dependent var	70.99250	
Sum squared resid	931.6073	Durbin-Watson stat	0.001882	

Lampiran E Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: CHI

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1579.347886	(7,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	239.240098	7	0.0000



Lampiran F Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	57.39269 (0.0000)	2.117896 (0.1456)	59.51059 (0.0000)
Honda	7.575796 (0.0000)	-1.455299 --	4.327845 (0.0000)
King-Wu	7.575796 (0.0000)	-1.455299 --	3.407450 (0.0003)
Standardized Honda	10.65825 (0.0000)	-1.298555 --	2.782652 (0.0027)
Standardized King-Wu	10.65825 (0.0000)	-1.298555 --	1.626518 (0.0519)
Gourierioux, et al.*	--	--	57.39269 (< 0.01)

Lampiran G Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: HAUSMAN

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.154210	4	0.5324

